

Koalisi Nasional

Publish What You Pay – Indonesia

Sekretariat: ICW, Jl. Kalibata Timur IV/D, No 6, Kalibata
Jakarta Selatan, Fax +62 21 7994005
Ph +62 21 7994015, 7901885

Jakarta, 29 April 2008
002-PS-04-2008

SIARAN PERS, Untuk diberitakan segera

PERTAMINA harus DIREFORMASI; Pemerintah Diminta Segera Ikut EITI

JAKARTA, PWYP Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan hasil kajian terbaru Transparansi Internasional melalui PROMOTING REVENUE TRANSPARENCY PROJECT (PRT) mereka yang menguak buruknya mekanisme transparansi di Pertamina dan Perusahaan-perusahaan Internasional yang bermain di sektor ekstraktif di Indonesia.

Pertama-tama, PWYP Indonesia menyambut hangat project TI ini karena PRT makin memperkaya researched-base informasi bagi pemberantasan korupsi. "PRT ini dihadirkan pada waktu yang tepat, saat tuntutan terhadap transparansi, secara nasional dan juga internasional, bagi badan publik makin kuat: perang terhadap korupsi makin gencar dan UU KIP baru saja disepakati DPR dan Pemerintah", kata Ridaya Laodengkowe, Koordinator Nasional PWYP Indonesia.

Akan tetapi kalau melihat hasil studi PRT ini, PWYP Indonesia merasa prihatin dengan buruknya kinerja transparansi PERTAMINA. Dari tiga indikator yang diukur, yakni pembayaran, operasi, program pencegahan dan penindakan, tingkat transparansi PERTAMINA adalah "rendah". Satu-satunya indikator yang menempatkan PERTAMINA dalam peringkat yang cukup menggembirakan, "tinggi", adalah pengaturan dan pengadaan barang dan jasa. Data ini merupakan konfirmasi atas keprihatinan dan kritik publik yang telah berkembang lama terhadap Badan Usaha Milik Negara dengan aset yang paling besar ini. "Temuan ini harus dijadikan acuan bagi manajemen PERTAMINA dalam mereformasi manajemen internal", demikian ditegaskan Ridaya Laodengkowe

Selain PERTAMINA sebagai state owned company, PRT juga dengan kerangka analisa yang hampir sama mengevaluasi kinerja transparansi perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia dalam sektor ekstraktif. Secara umum keterbukaan pembayaran semua perusahaan kepada pemerintah masih rendah. Dari semua perusahaan yang disurvei hanya Talisman Energy dan CNOOC yang membuka kepada publik kinerja; itupun disebabkan oleh kewajiban hukum yang diatur *home country* mereka. Sebagian besar perusahaan kinerja transparansi mereka hanya pada kisaran menengah; karena Indonesia sebagai host country tidak memberlakukan standar transparansi yang tinggi dalam hal, misalnya, kontrak (secrecy clausul).

Oleh karena itu Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta: PERTAMA, pemerintah segera mengatur standar transparansi bagi pemain sektor ekstraktif dalam bentuk peraturan perundangan. KEDUA, PERTAMINA harus direformasi dengan mengacu pada best practices yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan negara lain. Ketiga, Pemerintah perlu segera bergabung dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), sebagai jangkar untuk mendorong transparansi sektor ekstraktif di Indonesia.***

Klarifikasi

- Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia: Koalisi nasional organisasi-organisasi non-pemerintah yang mendorong agar Indonesia keluar dari “kutukan sumberdaya” atau “resource curse” melalui transparansi pembayaran pendapatan negara dari sektor ini, transparansi pengelolaan sektor ekstraktif dan transparansi operasi perusahaan di sektor ekstraktif. Koalisi ini merupakan irisan gerakan advokasi antikorupsi, anggaran dan lingkungan hidup, bergabung dengan koalisi global PUBLISH WHAT YOU PAY.